SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Infrastruktur Tak Bisa Maksimal, Alokasi RAPBD Lebih Banyak untuk Belanja Pegawai

Dibandingkan Pekerjaan Fisik

Entitas / Cakupan : Kabupaten Purwakarta

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.5

Edisi : Sabtu, 09 Desember 2018

Infrastruktur Tak Bisa Maksimal

Alokasi RAPBD

Lebih Banyak untuk Belanja Pegawai Dibandingkan Pekerjaan Fisik

PURWAKARTA, (PR).-

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengakui pembangunan infrastruktur tidak bisa maksimal pada 2019. Ia beralasan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019 lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan dengan pekerjaan fisik.

"Peningkatannya itu Rp 107 miliar untuk belanja pegawai. Kalau untuk infrastruktur dari APBD murni saja hanya Rp 101 miliar," kata Anne di kawasan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Jumat (7/12/2018). Anggaran tersebut belum termasuk bantuan pemerintah provinsi dan pusat.

Menurut perhitungannya, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Oleh karen a itu, Anne menyiasati realisasi pembangunan fisik secara bertahap selama beberapa tahun ke depan.

Anne memperkirakan banyak program pembangunan infras truktur yang tidak bisa terealisasi. Nai nun, ia tidak memerinci program yan g dimaksud. Sementara belanja pegawai tahun depan meningkat kareria ada penambahan pegawai neg eri sipil hasil seleksi tahun ini.

Terkendala RKPD

Selain itu, Anne mengakui penyusunan RAPBD 2019 juga terkendala Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan sebelum ia dilantik menjadi bupati, September 2018 lalu. "Kalau di 2019, saya terkendala karena RKPD -- yang merupakan dasar penyusunan RAPBD -- tidak boleh diubah," katanya.

RKPD 2019 ditetapkan oleh pejabat sementara kepala daerah, M Taufiq Budi Santoso, sebelum Anne dilantik

menjadi bupati. Kondisi tersebut dianggap membatasi rancangan program anggaran yang sesuai dengan visi misinya saat kampanye.

Anne memperkirakan baru bisa memasukkan 80 persen programnya pada anggaran daerah tahun depan. "Visi misi saya banyak tetapi itu harus didukung dengan anggaran yang cukup. Ketika saya masuk, kemampuan anggarannya tidak ada," katanya.

Menurut dia, penyusunan RKPD seharusnya disesuaikan dengan visi misi bupati terpilih. Namun yang terjadi di Purwakarta dinilai berbeda karena RKPD sudah disahkan terlebih dahulu sebelum bupati terpilih menyusun RAPBD. Penetapan RKPD juga telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

RAPBD Purwakarta 2019 disepakati sebesar Rp 2,1 triliun. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta menyebutkan sekitar Rp 1,3 triliun di antaranya merupakan pos anggaran belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bantuan sosial, hibah, dana bagi hasil desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan desa. Sementara belanja langsung sebesar Rp 814 miliar akan digunakan untuk belanja kegiatan pemerintah daerah yang bersumber dari berbagai sektor pendanaan.

"Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 465 miliar. Sisanya dari dana transfer (dari pemerintah provinsi dan pusat)," kata Pelaksana Tugas Kepala BKAD Norman Nugraha.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Neng Supartini mengatakan, tunjangan kinerja daerah (TKD) menjadi kewajiban daerah dari Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengurangi potensi korupsi.

Neng berharap pengalokasian tersebut sesuai dengan tujuan dan target awal. (Hilmi Abdul Halim)***